



Mengatasi Pengangguran Melalui Peningkatan Kewirausahaan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri

Eliana Kesumadewi*, Aprilyani

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam mengatasi pengangguran melalui peningkatan kewirausahaan, dengan fokus khusus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan tinjauan teori komunikasi modernisasi. Program TKM yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dirancang untuk memperluas kesempatan kerja dengan menciptakan wirausaha baru dan memobilisasi seluruh potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Sasaran program ini meliputi tenaga kerja terdidik yang menganggur dan berpotensi berwirausaha, serta wilayah-wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi atau kantong pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program TKM memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan keterampilan kewirausahaan di berbagai daerah. Program ini tidak hanya membantu menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tenaga kerja, serta membina pengusaha pemula yang mandiri dan produktif. Dengan demikian, Program TKM berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs ke-8, yaitu memastikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: TKM, Pengangguran, Kewirausahaan, SDGS-8

*Correspondence: Eliana Kesumadewi
Email: kesumadewieliana@gmail.com

Received: 12 June 2024
Accepted: 19 June 2024
Published: 26 June 2024



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for open access publication
under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution (CC BY)
license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the contribution of the Independent Worker Program in addressing unemployment through increased entrepreneurship, with a particular focus on achieving Sustainable Development Goal 8: Decent Work and Economic Growth. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach and a review of modernization communication theory. The TKM program managed by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia is designed to expand employment opportunities by creating new entrepreneurs and mobilizing all potential resources in the community. The targets of this program include educated workers who are unemployed and have the potential for entrepreneurship, as well as areas with high unemployment rates or migrant worker enclaves. The results show that the TKM Program has significantly contributed to reducing unemployment and improving entrepreneurial skills in various regions. The program not only helps create new jobs but also improves the knowledge, abilities, and skills of the workforce, as well as fostering independent and productive budding entrepreneurs. Thus, the TKM Program plays an important role in supporting the achievement of the 8th SDGs, namely ensuring decent work and inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: TKM, Unemployment, Entrepreneurship, SDGS-8

Pendahuluan

Berdasarkan struktur demografi Indonesia saat ini, negara ini memiliki potensi untuk mengalami bonus demografi hingga 180 juta individu usia kerja yang masih mampu menghasilkan sesuatu antara tahun 2020 dan 2030. Hal ini dikenal sebagai bonus demografi di usia produktif. Namun, pandemi covid-19 sebenarnya telah membawa kondisi ketenagakerjaan yang sudah ada sejak lama. Sebelum pandemi, angkatan kerja Indonesia bisa dibilang berkualitas rendah, dengan jumlah pengangguran sebanyak 139,81 juta orang pada Februari 2021 berbanding 131,06 juta orang yang bekerja. Orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah terus mendominasi angkatan kerja, mengindikasikan bahwa masyarakat tidak terlalu menghargai mereka.

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Februari 2021 tercatat sebanyak 9,10 juta orang. Dengan angka 11,13 persen, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi. Lulusan SMA sebesar (9,09%), lulusan perguruan tinggi dan universitas (5,98%), pemegang diploma (5,87%), lulusan SMP (6,45%), dan lulusan SD (2,98%) berada di urutan berikutnya. Namun, dunia bisnis terguncang pada tahun 2020 ketika COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi dan jaga jarak sebagai langkah pencegahan. Secara keseluruhan, 2.146.667 pekerja terkena dampak dari pandemi ini; 383.645 pekerja kehilangan pekerjaan, 1.132.117 pekerja dirumahkan, dan 630.905 pekerja informal mengajukan kebangkrutan. Sementara itu, 465 pekerja magang dipulangkan dan 34.179 calon pekerja migran dari Indonesia tidak dapat berangkat.

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan salah satu upaya unggulan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasi hal ini, mengurangi dampaknya, dan mencegah kondisi ekonomi masyarakat semakin memburuk. Upaya ini memperluas kesempatan kerja bagi pekerja formal dan informal, yang merupakan langkah untuk mencapai pembangunan ketenagakerjaan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing tenaga kerja merupakan prioritas Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang merupakan bagian dari Program Pembentukan Tenaga Kerja Muda Mandiri Profesional (TKPMP) menawarkan pelatihan dan dukungan fasilitasi usaha. Program ini juga memberikan bantuan pelatihan dan fasilitasi usaha kepada para mantan pekerja sukarela dan kelompok dampingannya melalui subsidi program dan upaya penguatan usaha kelompok.

Pemerintah Indonesia harus memetakan lanskap pasar tenaga kerja untuk mengatasi rintangan dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh bonus demografi yang semakin dekat sementara dunia berjuang dengan dampak pandemi COVID-19. (Laksmono & Rahmatutik, 2023) Karena dampak pandemi yang tidak merata di berbagai industri, telah terjadi reorganisasi tenaga kerja yang dapat menyebabkan pengangguran yang berkepanjangan. Untuk mempersiapkan dividen demografi dan potensi pemulihan ekonomi, pemerintah juga harus merencanakan beberapa sektor ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran umum tentang lanskap ketenagakerjaan setelah pandemi Covid-19.

Pemetaan tenaga kerja dan industri yang terkena dampak COVID-19; pemetaan jenis pekerjaan yang hilang dan pekerjaan baru yang tercipta sebagai akibat dari dinamika pandemi; pemetaan peluang digitalisasi bisnis untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan pemetaan sektor industri prioritas setelah COVID-19, semuanya tercakup dalam pemetaan tersebut. Jika dimanfaatkan secara efektif, potensi digitalisasi dalam pelatihan vokasi dapat dengan cepat menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terinformasi sekaligus memetakan tujuan pekerjaan di masa depan. Kerja sama kementerian dan lembaga sangat penting untuk menjamin bakat, kualifikasi, dan kompetensi tenaga kerja saat ini.

Adam (2016) menyatakan bahwa produktivitas dan daya saing pekerja Indonesia masih relatif buruk. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Akibatnya, tenaga kerja Indonesia mendapatkan upah yang rendah dan kurang mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara tetangga, Malaysia dan Thailand. Dengan besarnya jumlah angkatan kerja di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia menghadapi berbagai peluang dan kendala. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia memiliki angkatan kerja yang cukup besar dan tersedia, potensinya untuk meningkatkan daya saing ekonomi belum sepenuhnya terwujud. Ada banyak variabel yang terlibat dalam masalah kompleks pengembangan sumber daya manusia dan bagaimana hal itu mempengaruhi daya saing ekonomi Indonesia. Di Indonesia, upaya untuk mengembangkan lapangan kerja terkait erat dengan upaya pemerintah untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Namun, saat Indonesia memasuki Revolusi Industri Keempat, Indonesia perlu meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pergeseran struktural ekonomi. Akibatnya, meskipun Indonesia memiliki populasi tenaga kerja yang relatif besar secara keseluruhan, tenaga kerja yang masuk ke pasar belum mampu meningkatkan daya saing ekonomi negara sebanyak yang seharusnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global, diperlukan peningkatan standar pendidikan dan pelatihan.

Menurut Marghana dan Triyanto (2019), ukuran lain dari kualitas tenaga kerja adalah jumlah wirausahawan di suatu negara yang dapat terus berinovasi untuk memenuhi permintaan dari pasar lokal, regional, nasional, dan internasional. Jumlah wirausahawan di negara yang lebih maju biasanya lebih banyak karena negara tersebut dapat menghadapi penurunan ekonomi dengan lebih baik. Sebaliknya, persentase wirausaha di Singapura, Malaysia, dan Thailand masing-masing adalah 3%, 5%, dan 7%, sedangkan di Indonesia hanya 1,65% orang yang menjadi pemilik usaha. Di Amerika Serikat, proporsi wirausahawan jauh lebih dekat dengan 10%, menurut Rizal dan Samsul (2015). Melalui kebijakan yang tepat sasaran untuk mendorong inovasi dan akses ke sumber daya bisnis, Indonesia memiliki tantangan yang signifikan dalam mendorong peningkatan populasi wirausaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi negara (Mirzanti et al., 2015). Mendanai pendidikan kewirausahaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perusahaan rintisan dan usaha kecil dan menengah

(UKM) merupakan langkah awal yang bijaksana untuk mencapai tujuan ini.

Pemerintah Indonesia menargetkan 2% dari populasi Indonesia menjadi wirausahawan pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) diimplementasikan, menurut studi yang dilakukan oleh Jamhari & Khotimah (2022). Untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kebijakan perluasan kesempatan kerja yang secara khusus menargetkan pengangguran dan setengah pengangguran. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan menyediakan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan. Melalui pertumbuhan keterlibatan masyarakat, inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan meningkatkan produktivitas pekerja. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong etos kerja yang kuat dan semangat kewirausahaan di masyarakat. Tidak hanya individu yang dapat menciptakan potensi desa, tetapi kelompok ekonomi kreatif yang dapat menciptakan peluang baru juga dapat melakukannya. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung wirausahawan, kerja sama di seluruh sektor publik, perusahaan, dan nirlaba diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Kekuatan ekonomi pedesaan secara keseluruhan bergantung pada penyediaan dana, pelatihan, dan pendampingan bisnis bagi para calon wirausahawan.

Salah satu komponen teknis yang dikembangkan dalam bantuan pengembangan dan penempatan tenaga kerja adalah program TKM. Efektivitas program ditentukan oleh seberapa baik masyarakat mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokalnya untuk menghasilkan kegiatan yang menguntungkan. [Rachmawatie dkk, 2020] Dengan cara yang sama, strategi pengembangan masyarakat berbasis aset memberdayakan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang kurang dimanfaatkan atau terabaikan, termasuk koneksi, kemampuan, dan infrastruktur, untuk menghasilkan usaha yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan mengidentifikasi komponen-komponen yang perlu dievaluasi, diperlukan analisis yang komprehensif. Pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah ini akan memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan strategi dan mengimplementasikan peningkatan yang akan meningkatkan efektivitas program LKM dan menjamin bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi program Tenaga Kerja Mandiri yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, memahami proses pelaksanaannya, dan mengidentifikasi potensi hambatannya. Diharapkan bahwa kesimpulan dari studi ini akan memberikan data yang komprehensif yang dapat membantu Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pengembangan dan administrasi program secara keseluruhan dan tepat sasaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan biasanya melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dengan landasan teori yang berfungsi sebagai panduan agar penelitian tetap fokus pada fakta-fakta di lapangan, penelitian ini mengutamakan proses dan makna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas sifat yang tepat dari gejala atau indikator yang termanifestasi dan memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana subjek penelitian berhubungan dengan fenomena sosial lainnya (Surachmad dalam Nurmandi & Purnomo, 2011). Metode tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Metode ini terdiri dari catatan resmi mengenai keadaan objek penelitian, seperti makalah ilmiah, temuan studi, tesis, dan survei dari berbagai organisasi pemerintah dan nonpemerintah (Hasan, 2002).

Studi literatur adalah metode pengumpulan data yang mengacu pada berbagai sumber, seperti buku, jurnal, majalah, dan makalah penelitian sebelumnya. Peneliti diharapkan menggunakan tinjauan pustaka untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukannya orisinal dan tidak menduplikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai prosedur penelitian yang akan digunakan. Tinjauan pustaka, menurut Nazir (2013), memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan semua pengetahuan dan gagasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menemukan konsep dan kerangka teori yang dapat digunakan untuk analisis data, serta kesenjangan dalam literatur yang ada. Selain itu, studi literatur membantu dalam menemukan teknik-teknik penelitian yang telah berhasil dengan baik dalam situasi yang sebanding sehingga dapat digunakan atau disesuaikan agar sesuai dengan tuntutan penelitian.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan para peneliti untuk sepenuhnya memahami latar belakang sosial dan budaya yang membentuk fenomena yang mereka pelajari. Hal ini penting karena konteks yang melatarbelakangi setiap kejadian sosial sangat terkait erat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada pembaca tentang fenomena yang sedang dipelajari, penelitian deskriptif kualitatif berusaha memberikan deskripsi yang kaya dan menyeluruh tentang keadaan dan pengaturan saat ini.

Analisis data yang komprehensif untuk penelitian ini meliputi pengkodean data, menemukan tema, dan menginterpretasikan hasilnya. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya, penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua data diperiksa secara menyeluruh dan metodis. Diharapkan kesimpulan dari penelitian ini akan memajukan pengetahuan secara signifikan mengenai hubungan antara program tenaga kerja mandiri (TKM) dan inisiatif untuk mengurangi pengangguran dengan menumbuhkan kewirausahaan.

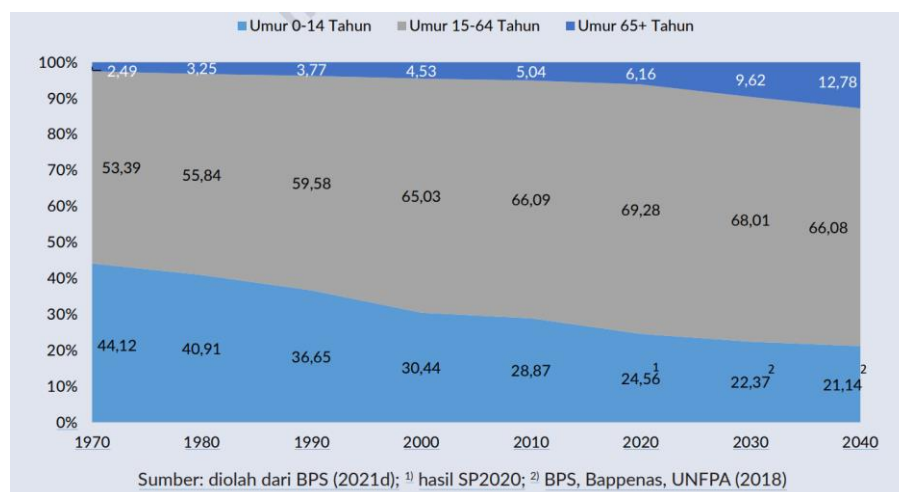
Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang dan mengimplementasikan program yang lebih efektif untuk

mengatasi pengangguran dan meningkatkan kewirausahaan di masyarakat. Melalui analisis yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai bagaimana teori modernisasi dapat diterapkan dalam konteks nyata untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Bonus Demografi & Angka Pengangguran di Indonesia

Keadaan ketika jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia produktif) melebihi jumlah penduduk usia non-produktif dikenal sebagai bonus demografi. Jumlah penduduk usia kerja yang cukup besar akan menyediakan pasokan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk operasi produksi. Selain itu, karena orang-orang dalam rentang usia produktif sering kali mengonsumsi lebih banyak daripada orang-orang dalam kelompok usia lainnya, ada potensi permintaan konsumsi yang sangat besar yang terkait dengan populasi yang besar dalam kelompok usia ini.



Gambar 1. Bonus Demografi Indonesia

Sumber: BPS

Karakteristik lain dari bonus demografi adalah kecenderungan untuk menurunkan tingkat kelahiran dan kematian, yang menghasilkan penurunan komposisi populasi kategori anak-anak dan peningkatan populasi usia lanjut. Persentase penduduk dalam kelompok usia produktif adalah 53,39 persen pada tahun 1971 dan meningkat menjadi lebih dari 70 persen pada tahun 2020, sedangkan persentase anak-anak adalah 44,12 persen pada tahun 1970 dan turun menjadi 24,56 persen pada tahun 2020. Proporsi anak-anak dalam keluarga menurun, yang menunjukkan bahwa jumlah anak secara keseluruhan lebih sedikit. Hal ini dapat membantu anggota keluarga yang terlibat dalam perekonomian menjadi lebih produktif karena mereka dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk bekerja atau menjalankan bisnis dibandingkan jika mereka memiliki lebih banyak anak.

Laju peningkatan populasi usia kerja telah mengubah distribusi usia Indonesia. Di sinilah istilah "bonus demografi" pertama kali muncul, merujuk pada proses pergeseran

distribusi usia penduduk sebagai akibat dari menurunnya angka kelahiran dan kematian sebagai bagian dari transisi demografi. Karena jumlah individu pada kelompok usia 0-14 tahun lebih sedikit, maka jumlah kelahiran yang lebih sedikit di masa lalu dapat mengakibatkan peningkatan populasi usia 15-64 tahun, yang merupakan kelompok usia produktif. Hal ini dapat terjadi ketika tingkat kelahiran menurun. Sementara itu, seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup dan membaiknya kondisi kesehatan, akan terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (usia di atas 65 tahun). Indonesia mungkin dapat mengambil keuntungan dari bonus demografi dengan memiliki populasi tenaga kerja yang besar dan berketerampilan tinggi. Hal ini sesuai dengan tuntutan ekspansi ekonomi, yang membutuhkan pasokan tenaga kerja berketerampilan tinggi yang berlimpah.

Namun bonus demografi dapat menjadi tantangan besar bagi negara jika tidak terserap dengan baik dan malah menyumbang angka pengangguran. Ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non-produktif, negara memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, tanpa penciptaan lapangan kerja yang memadai, lonjakan angkatan kerja ini dapat berujung pada peningkatan pengangguran. Keterbatasan lapangan kerja, kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan pendidikan yang tidak memadai merupakan faktor utama yang menyebabkan tenaga kerja muda kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pembangunan ekonomi yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat menyebabkan konsentrasi pengangguran di area tertentu. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri, serta tekanan pada layanan sosial dan infrastruktur, semakin memperparah situasi.

Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan tren penurunan signifikan menurut data yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pudastik) Kementerian Ketenagakerjaan (2024), yang mencatat penurunan sebanyak 1,24 juta orang dari tahun 2021 hingga 2023, dengan jumlah pengangguran mencapai 7,86 juta jiwa pada tahun 2023. Meskipun penurunan ini merupakan kemajuan positif, angka pengangguran ini masih bisa ditekan lebih lanjut melalui berbagai kebijakan pemerintah yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Salah satu cara efektif adalah dengan mengimplementasikan program-program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta memperkuat sistem pendidikan vokasional untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Selain itu, pemerintah perlu mendorong kewirausahaan melalui inisiatif seperti Program Tenaga Kerja Mandiri, yang membantu individu menciptakan lapangan kerja sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal. Kebijakan investasi yang mendukung pertumbuhan industri padat karya, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, juga sangat penting. Selain itu, insentif fiskal dan regulasi yang mendukung investasi asing dapat memperluas peluang kerja. Melalui upaya yang terkoordinasi dan terarah, tingkat pengangguran di Indonesia dapat ditekan lebih jauh, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri di Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi pengangguran dan setengah pengangguran, salah satunya adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui promosi tenaga kerja mandiri. Program-program ini bertujuan untuk membekali individu dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjadi wiraswasta, sehingga berkontribusi pada kemandirian ekonomi mereka dan kesejahteraan komunitas mereka secara keseluruhan.

Urgensi dari program-program tersebut sangat jelas, karena pengembangan tenaga kerja di Indonesia sangat terkait dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan martabat tenaga kerja dan menciptakan masyarakat yang makmur dan adil (Kusdarini et al., 2021). Selain itu, kompleksitas masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada dukungan finansial dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menangani faktor-faktor sosial dan budaya yang mendasarinya (Fitri, 2022).

Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri adalah inisiatif yang dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas dan meningkatkan kesempatan kerja dengan fokus pada penciptaan dan pengembangan wirausaha baru. Program ini bertujuan menciptakan peluang kerja baru dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya lokal yang ada, serta memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal untuk menciptakan wirausaha yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan pemanfaatan maksimal sumber daya lokal dan dukungan pemerintah, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jamhari & Khotimah, 2022). Tujuan utama dari program ini mencakup penciptaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja terdidik yang menganggur, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, serta peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan wawasan berusaha. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, program ini juga menumbuhkan dan mengembangkan kader-kader wirausahawan baru atau calon wirausahawan yang mandiri dan produktif. Sasaran program ini adalah para pengangguran dengan pendidikan minimal SMA yang berminat untuk berwirausaha, baik mereka yang berstatus setengah pengangguran maupun pengangguran terbuka.

Tabel 1. Data Penerima Bantuan Program TKM 2022

No	Provinsi	Jumlah	No	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	1.520	18	Kepulauan Riau	140
2	Bali	920	19	Lampung	1.870
3	Banten	4.510	20	Maluku	410
4	Bengkulu	1.340	21	Maluku Utara	670
5	Di Yogyakarta	770	22	Nusa Tenggara Barat	2.530
6	Dki Jakarta	6.140	23	Nusa Tenggara Timur	2.070
7	Gorontalo	430	24	Papua	500
8	Jambi	4.050	25	Papua Barat	240
9	Jawa Barat	13.650	26	Riau	1.100
10	Jawa Tengah	17.400	27	Sulawesi Barat	2.320

11	Jawa Timur	27.150	28	Sulawesi Selatan	7.130
12	Kalimantan Barat	4.540	29	Sulawesi Tengah	1.290
13	Kalimantan Selatan	360	30	Sulawesi Tenggara	3.160
14	Kalimantan Tengah	1.030	31	Sulawesi Utara	1.780
15	Kalimantan Timur	1.480	32	Sumatera Barat	3.160
16	Kalimantan Utara	1.710	33	Sumatera Selatan	4.150
17	Kepulauan Bangka Belitung	680	34	Sumatera Utara	4.800
Jumlah total keseluruhan					125.000

Sumber: Satu data Kemenaker

Program Tunjangan Kerja Management (TKM) pada tahun 2022 berhasil menjangkau 125.000 penerima bantuan di seluruh Indonesia, menurut data dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagian besar penerima bantuan berada di Pulau Jawa, dengan Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penerima terbanyak, yaitu 27.150 jiwa. Sementara itu, Kepulauan Riau tercatat memiliki 140 penerima bantuan. Latar belakang dari distribusi bantuan ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa, sebagai pusat ekonomi dan industri Indonesia, memiliki kebutuhan yang lebih besar akan dukungan finansial dan program pengembangan keterampilan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar dan beragam sektor industri, memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengembangan tenaga kerja.

Dengan mayoritas penerima bantuan berada di Pulau Jawa, implementasi program TKM ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Dukungan finansial yang diberikan melalui program ini juga diharapkan dapat membantu para penerima untuk mengembangkan keterampilan mereka, memulai usaha mandiri, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Peran Program TKM serta kewirausahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pekerjaan layak & Pertumbuhan Ekonomi (SDGS 8)

Sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 yang melanda dunia, upaya Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB pada tahun 2030 menghadapi tantangan signifikan (Novita, 2021). Pandemi ini berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kemajuan menuju SDGs, terutama di bidang pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, serta memastikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun menghadapi hambatan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas pencapaian SDGs, termasuk melalui pengembangan Rencana Aksi Nasional 2020-2024 yang merinci strategi untuk mencapai tujuan tersebut di periode pasca-pandemi (Novita, 2021). Salah satu inisiatif yang mungkin berkontribusi dalam upaya ini adalah program Tunjangan Kerja Management (TKM), yang bertujuan mendukung pekerja dan mempromosikan pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan.

Program Tunjangan Kerja Management (TKM) merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan finansial kepada pekerja di Indonesia. Program ini sejalan dengan tujuan SDG 8, yang bertujuan untuk "mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua" (Novita, 2021). Dengan memberikan dukungan finansial kepada pekerja, program TKM dapat membantu mengurangi kemiskinan, memastikan akses ke perlindungan sosial, dan mempromosikan penciptaan lapangan kerja - semua ini sangat penting untuk mencapai SDG 8. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

SDGs nomor 8 berfokus pada mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, menyediakan pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua orang, serta mendorong inovasi dan kewirausahaan. Dalam konteks ini, Program TKM memainkan peran penting dengan mengembangkan usaha mikro dan kecil (UMKM), sektor yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Melalui pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan, Program TKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru bagi pemilik usaha dan karyawan mereka tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Penciptaan lapangan kerja baru menjadi salah satu fokus utama Program TKM. Dengan mengembangkan UMKM, program ini memberikan akses modal usaha dan pelatihan yang esensial bagi para pelaku UMKM. Pemberian modal usaha memungkinkan pelaku UMKM untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka, sementara pelatihan kewirausahaan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha dengan lebih efektif. Dengan cara ini, Program TKM tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui kegiatan ekonomi yang produktif.

Selain itu, peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM merupakan dampak positif lain dari Program TKM. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh program ini membantu para pelaku UMKM untuk mengoptimalkan operasi bisnis mereka, memperbaiki manajemen usaha, dan meningkatkan kualitas produk serta layanan yang mereka tawarkan. Peningkatan ini tidak hanya membuat UMKM lebih kompetitif di pasar lokal dan internasional tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas ini dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Program TKM juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan fokus pada pengembangan UMKM di berbagai daerah di Indonesia, program ini memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan SDGs 8 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, dengan mendukung budaya kewirausahaan dan

inovasi, Program TKM membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi individu untuk memulai dan mengembangkan usaha. Dukungan ini mencakup pelatihan, pendampingan, dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk inovasi. Dengan demikian, Program TKM tidak hanya membantu pelaku UMKM mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka tetapi juga mendukung pencapaian tujuan SDGs 8 dalam menyediakan pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua.

Tabel 2. Data UMKM 2018 - 2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64,19	65,47	64	65,46	66
Pertumbuhan (%)		1,98%	-2,24%	2,28%	1,52

Sumber: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

UMKM mencakup 99% dari seluruh unit bisnis di Indonesia, yang menunjukkan kontribusi signifikan mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memproyeksikan bahwa akan ada sekitar 66 juta pelaku bisnis UMKM pada tahun 2023. PDB Indonesia disumbangkan oleh UMKM sebesar Rp 9.580 triliun, atau 61% dari total PDB. Selain itu, UMKM mempekerjakan hampir 117 juta orang, atau 97% dari total angkatan kerja. Jumlah modal usaha pada saat pendirian pada dasarnya menentukan apakah perusahaan termasuk dalam kategori UMKM. Sebuah bisnis diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro jika modalnya, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak lebih dari satu miliar rupiah. Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal lebih dari satu miliar rupiah tetapi tidak lebih dari lima miliar rupiah. Usaha Menengah didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki modal antara lima hingga sepuluh miliar rupiah. Perusahaan dengan modal lebih besar dari itu diklasifikasikan sebagai perusahaan besar.

Kewirausahaan memainkan peranan krusial dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-8 yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan yang layak untuk semua, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Wirausahawan, dengan semangat dan kegigihan mereka, berkontribusi secara signifikan dalam penciptaan lapangan kerja. Mereka membuka peluang kerja baru dengan mendirikan dan mengembangkan usaha mereka, membantu mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memerangi kemiskinan. Menurut ILO, wirausahawan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi pada 90% lapangan kerja di negara-negara berkembang.

Selain itu, kewirausahaan mendorong peningkatan inovasi dan daya saing. Wirausahawan terus berinovasi untuk menciptakan produk, layanan, dan model bisnis baru, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Contoh nyata adalah perkembangan start-up teknologi yang pesat dengan ide-ide kreatif dan solusi inovatif mereka. Kewirausahaan juga memberdayakan individu dan komunitas dengan menyediakan peluang untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri, membantu

meningkatkan inklusi ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan memberdayakan kelompok marginal. UNDP menekankan bahwa kewirausahaan wanita, khususnya di negara berkembang, memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender.

Wirausahawan lokal berkontribusi pada pengembangan ekonomi di daerah mereka dengan menciptakan lapangan kerja, membeli produk dan layanan lokal, serta mendorong investasi. Usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi tulang punggung perekonomian lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil. Selain itu, kewirausahaan mendorong pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja, seperti kepemimpinan, kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi. Wirausahawan muda mendapatkan peluang untuk belajar dan berkembang, mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh tantangan.

Kewirausahaan, khususnya dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM), berperan penting dalam berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 8 di Indonesia (Tambunan, 2007). UKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, mencakup lebih dari 90% dari seluruh bisnis di luar sektor pertanian dan berfungsi sebagai penyedia kesempatan kerja terbesar di seluruh negeri (Joon, 2018). Sektor UKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana ditekankan dalam SDG 8, yang bertujuan untuk "mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua" (Zulfikar et al., 2021; Joon, 2018). Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya UKM dan telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong pengembangan praktik kewirausahaan yang sadar lingkungan dan berkelanjutan (Zulfikar et al., 2021).

Meskipun wirausahawan memainkan peran penting dalam mencapai SDGs 8, mereka juga menghadapi tantangan seperti akses permodalan yang terbatas, kurangnya pelatihan dan mentorship, serta birokrasi yang rumit. Namun, terdapat banyak peluang bagi wirausahawan untuk berkontribusi pada SDGs 8, termasuk dukungan pemerintah yang menyediakan akses permodalan, pelatihan, dan mentorship, investasi dari investor dalam usaha wirausahawan yang berkelanjutan dan berdampak sosial, serta pemanfaatan teknologi digital dan platform online untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi bisnis mereka.

Dengan mendukung wirausahawan, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewirausahaan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai SDGs 8, dan dengan bersama-sama memajukan kewirausahaan, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi semua (UNDP, 2021). Maka program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) memainkan peran kunci dalam mendukung keberhasilan dan pertumbuhan UMKM, yang sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Melalui Program TKM, pemerintah Indonesia berfokus pada pemberdayaan UMKM dengan memberikan akses modal usaha, pelatihan kewirausahaan,

dan pendampingan manajemen usaha. Hal ini sangat penting mengingat mayoritas pelaku usaha di Indonesia berada pada kategori UMKM, yang mencakup 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia.

Kesimpulan

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia merupakan langkah strategis dalam mengatasi masalah pengangguran melalui peningkatan kewirausahaan. Program ini tidak hanya memberikan solusi langsung bagi tenaga kerja terdidik yang menganggur, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan wirausaha baru. Dengan fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), TKM secara signifikan berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Kontribusi TKM terhadap SDGs 8 dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan mendorong terbentuknya UMKM yang menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Kedua, program ini meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan manajemen usaha para pelaku UMKM. Ketiga, TKM mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan mendistribusikan peluang ekonomi secara merata di berbagai daerah, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, TKM mendukung kewirausahaan dan inovasi dengan mendorong budaya kewirausahaan di masyarakat serta membantu pelaku UMKM untuk berinovasi dan mengembangkan produk baru. Terakhir, program ini juga mendorong kemandirian ekonomi para pelaku UMKM, meningkatkan taraf hidup mereka, dan selaras dengan tujuan SDGs 8 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, Program Tenaga Kerja Mandiri telah menunjukkan bahwa peningkatan kewirausahaan adalah salah satu solusi efektif dalam mengatasi pengangguran. Dengan terus mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan memberikan dukungan yang tepat, program ini diharapkan dapat terus berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan pencapaian tujuan pembangunan global.

Daftar Pustaka

- Adam, L. (2016). Membangun daya saing tenaga kerja Indonesia melalui peningkatan produktivitas (Promoting Indonesian labor competitiveness through its productivity improvement). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 72.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan. *Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan - tabel statistik. *Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3OSMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>
- Fitri, M. (2022). Efforts to manage the unemployment and poverty problems in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211125.083>
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. *Ghalia Indonesia*.
- Imawan, R. (2002). Peningkatan daya saing: Pendekatan paradigmatis politis. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 6(1), 79-80.
- Jamhari, T., & Khotimah, N. (2022). Program tenaga kerja mandiri (TKM): Konsep dan implementasi. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(3), 270-286. <https://doi.org/10.47198/naker.v17i3.133>
- Joon, O. (2018). ICSB 2016 Conference: The role and impact of SMEs in implementing the new sustainable development goals. *Journal of Small Business Management*, 56, 6-7. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12435>
- Kusdarini, E., Puspitasari, C. D., Sakti, S. W. K., & Wahyuni, P. M. (2021). The urgency of legal literacy for Indonesian migrant workers through distance education. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 399-416. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2317>
- Margahana, H., & Triyanto, E. (2019). Membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. *Edunomika*, 3(2), Agustus.
- Mirzanti, I. R., Simatupang, T. M., & Larso, D. (2015). Mapping on entrepreneurship policy in Indonesia. *Procedia: Social & Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.319>
- Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. *Ghalia Indonesia*.
- Novita, A. A. (2021). Maintaining the SDGs target during pandemic COVID-19. *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.109>

- Nurmandi, A., & Purnomo, E. P. (2011). Making the strategic plan work in local government: A case study of strategic plan implementation in Yogyakarta Special Province (YSP). *International Review of Public Administration*, 16(2), 143–164. <https://doi.org/10.1080/12264431.2011.10805200>
- Rachmawatie, D., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Juanda, B. (2020). Empowerment of rural community through the development of renewable electricity. *Jurnal Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 8(2). <https://doi.org/10.22437/ppd.v8i2.8077>
- Rahmatutik, N., & Laksmono, B. S. (2023). Active labour market policy in Indonesia: Reviewing the employment policies and programmes' preparation. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i9.563>
- Tambunan, T. (2007). Entrepreneurship development: SMEs in Indonesia. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 12(01), 95–118. <https://doi.org/10.1142/s1084946707000575>
- Zulfikar, R., Widyanti, R., Basuki, B., Ade, M., & Purboyo, P. (2021). Encourage SMEs sustainable behavior during COVID-19 pandemic through competitive advantages and corporate culture. *Serbian Journal of Management*, 16(2), 405–417. <https://doi.org/10.5937/sjm16-25966>